

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI  
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA  
BPKAD KABUPATEN LAMONGAN**

**Business Cases Report Magang MB-KM**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi**

**Program Studi S1 Akuntansi**



Disusun Oleh:

**Khoirul Anam**

(31401900086)

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
SEMARANG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN BUSINESS CASES REPORT  
MAGANG MB-KM**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN  
KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN  
LAMONGAN**

**Disusun Oleh :  
Khoirul Anam  
Nim : 31401900086**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat dilanjutkan ke hadapan  
sidang panitia ujian BUSINESS CASES REPORT MAGANG MB-KM

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 7 Februari 2023  
Dosen Pembimbing Lapangan



Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA

NIDN: 0610107001

**LEMBAR PENGESAHAN BUSINESS CASES REPORT  
MAGANG MB-KM**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN  
KINERJA KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN LAMONGAN**

**Disusun Oleh :**  
**Khoirul Anam**  
**Nim : 31401900086**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal Kamis, 01 November 2022

Susunan dewan penguji

Dosen Pembimbing

Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA

NIDN: 0610107001

Penguji 1

penguji 2

Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIDN: 0613086401

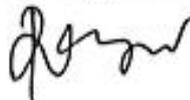
Dr. Sri Anik, SE M.Si

NIDN: 0604086802

Business Cases Report Magang MB-KM telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Semarang 1 November 2022

Ketua Program Studi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK : 211403012

**LEMBAR PENGESAHAN BUSINESS CASES REPORT  
MAGANG MB-KM**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN  
KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN  
LAMONGAN**

**Disusun Oleh :  
Khoirul Anam  
Nim : 31401900086**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal Jumat, 24 Februari 2023

**Susunan dewan penguji**

Dosen Pembimbing Lapangan

Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA

NIDN: 0610107001

Penguji

Penguji

Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE.,  
S.Si., M.Si., Akt., CA., CSRA.,  
CSRS

Dr. Sri Anik, SE., M.Si.

NIDN: 0612026802

NIDN: 0604086802

Business Cases Report Magang MB-KM telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Semarang, 7 Maret 2023

Ketua Program Studi

Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIDN: 0611088001

## PERNYATAAN LAPORAN MAGANG

Nama : Khoirul Anam

Nim : 31401900086

Program Studi : Akuntansi

Jurusan : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan magang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuanagan Daerah Pada Bpkad Kabupaten Lamongan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam laporan magang ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan magang ini adalah plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 21 Agustus 2022

Yang menyatakan



Khoirul anam

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Anam

NIM : 31401900086

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**"ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA KEUANAGAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN LAMONGAN"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 September 2023

Yang menyatakan,

  
Khoirul Anam

\*Coret yang tidak perlu

## **ABSTRACT**

*This study examines the analysis of regional financial ratios as an assessment of regional financial performance at BPKAD Lamongan Regency. The purpose of this study is to determine the ratio of regional financial performance of Lamongan Regency in the fiscal year 2017 to 2021, this research uses a qualitative descriptive method with direct observation in Lamongan and data collection that already exists in the realization of the Lamongan Regency Government Budget. The results of this study determine the effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, independence ratio, and regional financial growth ratio in Lamongan district.*

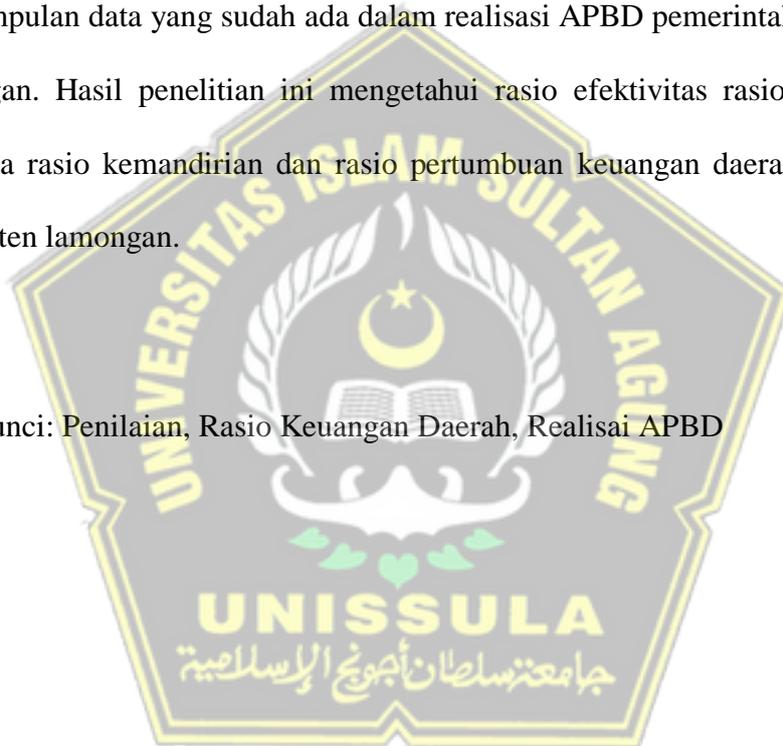
**Keywords:** Assessment, Regional Financial Ratio, APBD Realization



## ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang analisis rasio keuangan daerah sebagai penilaian kinerja keuangan daerah pada BPKAD kabupaten lamongan. Tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui rasio kinerja keuangan daerah kabupaten lamongan pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi secara langsung di lampangan dan pengumpulan data yang sudah ada dalam realisasi APBD pemerintahan kabupaten lamongan. Hasil penelitian ini mengetahui rasio efektivitas rasio efisien rasio aktivitas rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan keuangan daerah yang ada di kabupaten lamongan.

Kata kunci: Penilaian, Rasio Keuangan Daerah, Realisasi APBD



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan laporan magang saya yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuanagan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Lamongan”

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang menggunakan laporan ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir. Laporan ini ditulis sebagai bagian dari magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, dan tujuannya adalah untuk mendokumentasikan pengalaman magang di dunia kerja.

Tak perlu dikatakan bahwa saya mengandalkan saran dan arahan banyak orang saat menulis laporan magang ini. Oleh karena itu, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang membantu saya dari lubuk hati saya. Pihak berikut termasuk dalam kategori ini:

1. Prof. Dr. H. Heru Sulisty, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
4. Khusnul Yaqin, S.,Si Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
5. Paini S.E, Selaku Dosen Supervisor dalam Kegiatan MBKM pada BPKAD Kabupaten Lamongan.
6. Kedua Orang Tuaku Sudarmanto dan Djaenab beserta Kakak-Kakakku Tercinta yang telah menjadi sumber inspirasi dan doa tiada henti bagi saya, baik secara finansial maupun lainnya.

7. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru Besar, Staf, dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi, yang tanpanya skripsi ini tidak akan terselesaikan.
8. Staf BPKAD Kabupaten Lamongan yang telah bermurah hati membagikan keahliannya guna membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada adik-adik saya atas dukungan dan motivasinya selama saya mengerjakan skripsi ini.

10. Sahabat-Sahabat Saya Yang Memberikan Semangat Tiada Henti

Sepanjang proses penulisan Laporan MB-KM ini, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kekurangan yang masih ada. Oleh karena itu, penulis menyambut baik dan mendorong semua umpan balik, termasuk saran untuk bagaimana mereka dapat meningkatkan pekerjaan mereka di masa mendatang.



Penulis

khoirul anam

## DAFTAR ISI

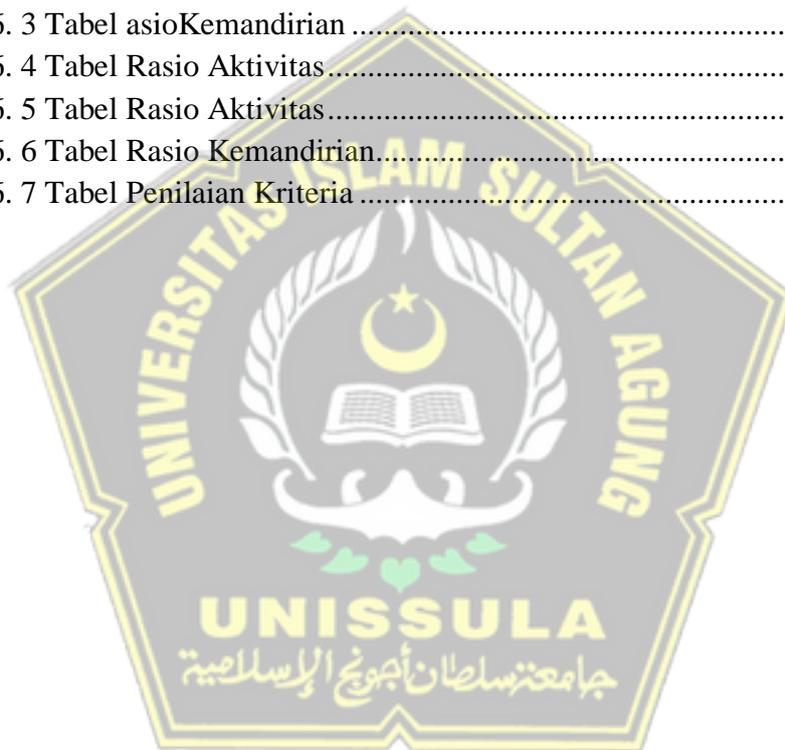
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN BUSINESS CASES REPORT MAGANG MB-KM iv	
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG.....	v
PERNYATAAN PURSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan magang.....	5
1.3 Sistematika Laporan.....	6
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	8
2.1 Profil Organisasi.....	8
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	22
3.1 Identifikasi masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan.....	22
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	26
4.1 Laporan Keuangan.....	26
4.1.1 Laporan Keuangan.....	26
4.1.2 Kinerja Keuangan.....	26
4.1.3 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah.....	28
4.1.4 Manfaat Kinerja Keuangan Daerah.....	28
4.1.5 Rasio Keuangan.....	30
BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....	33

5.1 Jenis Penelitian .....	33
5.2 Subjek dan Objek Lapangan.....	33
5.3 Data dan Metode Pengumpulan Data.....	34
5.3.1 Sumber Data .....	34
5.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	34
5.4 Analisis Data .....	34
5.4.1 Reduksi Data.....	35
5.4.2 Penyajian Data .....	38
5.4.3 Penarikan kesimpulan.....	38
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	40
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	56
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Selisish Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017-2021 .....	4
Tabel 2. 1 Anggaran Dan Realisasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021.....	17
Tabel 2. 2 Aktivitas kegiatan magang di BPKAD Kabupaten Lamongan Bulan Februari-Juni 2022 .....	19
Tabel 6. 1 Rasio Efektivitas .....	42
Tabel 6. 2 Tabel Rasio Efisiensi .....	45
Tabel 6. 3 Tabel asioKemandirian .....	48
Tabel 6. 4 Tabel Rasio Aktivitas.....	50
Tabel 6. 5 Tabel Rasio Aktivitas.....	52
Tabel 6. 6 Tabel Rasio Kemandirian.....	54
Tabel 6. 7 Tabel Penilaian Kriteria .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....10



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan dimulainya era baru dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah, Indonesia berada di garis terdepan dalam tren pematangan pengelolaan keuangan negara ini. Potensi suatu daerah untuk kegiatan dan pertumbuhan sebagian besar bergantung pada kualitas manajemen keuangannya, yang pada gilirannya memiliki efek mendalam pada hasil untuk daerah secara keseluruhan. Kekayaan daerah dan keutuhannya dapat dilindungi dengan pengelolaan keuangan yang kompeten.

Rencana dan kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk daerah berpenghasilan tinggi harus memprioritaskan industri yang sudah mapan dan cocok di daerah tersebut, serta faktor fisik dan keuangan serta infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan secara terus menerus berdasarkan data yang dapat dipercaya juga sangat penting. Tumbuh atau tidaknya perekonomian suatu daerah tergantung pada peran yang dimainkan oleh pemerintah daerahnya dalam mengelola keuangannya. Seberapa baik pemerintah daerah membelanjakan dan menghemat uangnya merupakan indikator seberapa baik fungsinya, seperti yang dikemukakan oleh Sari & Mustanda (2016) (Rahmat et al., 2020)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1 yaitu Semua tugas ini bersama banyak tugas lainnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pengelolaan Keuangan Daerah," yang mencakup setiap aspek pengelolaan uang daerah.

Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni.

- 1) Pengelola keuangan daerah;
- 2) Pembinaan dan pengawasan.
- 3) Penyusunan rancangan APBD;
- 4) Pelaksanaan dan penatausahaan;
- 5) APBD;
- 6) Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- 7) Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 8) Badan layanan umum daerah;
- 9) Informasi keuangan daerah; dan
- 10) Penetapan APBD;
- 11) Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- 12) Kekayaan daerah dan utang daerah;
- 13) Penyelesaian kerugian keuangan daerah;

Besaran PAD diharapkan menjadi salah satu faktor terbesar yang memungkinkan negara melaksanakan otonomi daerah karena rendahnya ketergantungan pada pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Banyak upaya

dilakukan untuk mengumpulkan dana untuk operasional pemerintah daerah. (Saragih & Siregar, 2020)

Agar individu dapat mengevaluasi apakah pemerintah daerah mereka telah memenuhi komitmen mereka untuk melayani mereka, pemerintah tersebut harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang merinci pengeluaran dan penerimaan mereka untuk tahun anggaran sebelumnya. Menurut Mahmudi (2016:2), kinerja keuangan perusahaan dapat divalidasi secara independen dengan memeriksa laporan keuangannya (Ramadhan, 2017)

Tujuan utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyebarkan informasi keuangan guna memberikan masukan bagi pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Namun masih banyak masyarakat yang tidak membaca neraca. Hal ini diharapkan karena tidak semua pemangku kepentingan mempunyai terminologi akuntansi yang sama. Analisis laporan keuangan penting karena memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menafsirkan laporan keuangan perusahaan adalah analisis rasio keuangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan struktur dan tata kerja Perangkat Daerah, BPKAD. BPKAD bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penatausahaan dana dan kekayaan daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014.

Untuk menentukan apakah pemerintah daerah dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerahnya atau tidak, ukuran kinerja harus dihitung dan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan tahunan pemerintah daerah. Selain itu, dengan meninjau data fiskal masa lalu, pemerintah daerah dapat meningkatkan operasionalnya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup penduduk di tahun mendatang.

Salah satu alat yang digunakan pemerintah daerah untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio laporan keuangan BPKAD yang digunakan sebagai wahana pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperoleh PAD yang berasal dari pajak daerah, pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan lainnya yaitu sebesar 429.200.063.876,82 pada tahun 2017, 241.118.418.614,99 pada tahun 2018, 472.002.823.163,86 pada tahun 2019, dan 4 pada tahun 2020. 81.759.328.988,51, dan 604.587.635.067,78.

**Tabel 1. 1 Selisih Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017-2021**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Daerah Total	2,716,042,671,044.82	1,665,458,244,482.99	2,864,496,711,416.86	2,838,278,209,317.51	2,975,019,936,520.51
Pendapatan Daerah					
Belanja Daerah Total	2,729,589,182,635.60	1,372,912,129,776.00	2,875,512,218,177.60	2,823,137,926,114.77	2,871,007,882,801.56
Belanja Daerah					
Selisih	(13,546,511,590.78)	292,546,114,706.99	(11,015,506,760.74)	15,140,283,202.74	104,012,053,718.95

Berdasarkan Tabel di atas, anggaran pendapatan Kabupaten Lamongan yang terealisasi pada Tahun 2017 sebesar 2,716,042,671,044.82

dan belanja daerahnya sebesar 2,729,589,182,635.60 mengalami defisit. Untuk Tahun 2018 pendapatan mengalami penurunan menjadi 1,665,458,244,482.99 dan belanja juga menurun menjadi 1,372,912,129,776.00 pada tahun 2019 ada kenaikan lagi sebesar 2,864,496,711,416.86 untuk belanja daerahnya sebesar 2,875,512,218,177.60 Untuk tahun 2020, pendapatannya sebesar 2,838,278,209,317.51 dan belanja daerahnya sebesar 2,823,137,926,114.77 mengalami surplus, pendapatan tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 2,975,019,936,520.51 dan belanja daerah sebesar 2,871,007,882,801.56

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu perangkat dan pengaturan tersebut, karena menetapkan sistem dan standar untuk administrasi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah selama tahun anggaran tertentu. Untuk memastikan sarana keuangan yang dapat digunakan untuk melaksanakan operasi-operasional pemerintah, laporan keuangan disajikan. Evaluasi kesehatan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan program, serta verifikasi bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Lamongan”

## 1.2 Tujuan magang

Sebagaimana dengan terlaksanakannya program praktek kerja magang MBKM yang dilaksanakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung ini diharapkan adanya manfaat timbal balik semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktek kerja magang MBKM ini.

Tujuan dari program Magang adalah untuk membekali mahasiswa dengan hard skill (keterampilan, pemecahan masalah yang kompleks, kemampuan analisis, dll.) dan soft skill (etika kerja, komunikasi, kolaborasi, dll.) yang diperoleh melalui aplikasi dunia nyata untuk meningkatkan kemampuan mereka. kompetensi keseluruhan, membuat mereka lebih dapat dipasarkan kepada pemberi kerja atau mampu mengembangkan jalur karier baru. Detailnya untuk tujuan magang

### **1.3 Sistematika Laporan**

Dalam penulisan laporan ini, penulis sistem penulisan yang terdiri dari tujuh bab yang setiap bab nya terdiri dari sub-sub bab sistematika:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan konteks untuk latar belakang masalah, tujuannya, dan menjabarkan sistematika laporan.

#### **BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

Di bagian ini, berisi tentang latar belakang organisasi, pendekatan yang diambil peneliti untuk berbagai masalah, dan tugas terkait magang lainnya.

#### **BAB III IDENTIFIKASI MASALAH**

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh BPKAD di Kabupaten Lamongan diuraikan pada bagian ini, bersama dengan pilihan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.

#### BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan bacaan tambahan tentang praktik terbaik untuk penyelesaian masalah.

#### BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Metode pengumpulan dan analisis data dirinci dalam bab ini.

#### BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan uraian masalah dan analisisnya berdasarkan metodologi yang digunakan di bagian sebelumnya.

#### BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan beberapa temuan akhir dan memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis, termasuk bagaimana organisasi dapat melakukan yang lebih baik dan apa yang harus diubah dalam strategi penelitian.

#### BAB VIII REFLEKSI DIRI

Apa yang dipelajari peneliti di perguruan tinggi, keuntungan magang dalam pengembangan soft skill, keuntungan magang dalam pengembangan kemampuan kognitif, identifikasi kunci kesuksesan profesional, dan pengembangan rencana peningkatan pribadi semuanya dirinci di sini bab.

## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

#### **2.1 Profil Organisasi**

BPKAD merupakan salah satu alat dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Direktur Daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan”, BPKAD menyelenggarakan beberapa fungsi penting. Alamatnya Jl. K.H.Ahmad Dahlan 01 Ramongan.

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu komponen otonomi daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kedudukan, tugas pokok, dan kegiatan BPKAD yakni “Melaksanakan aspek Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.”.

“Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah”

#### **MISI**

BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan:

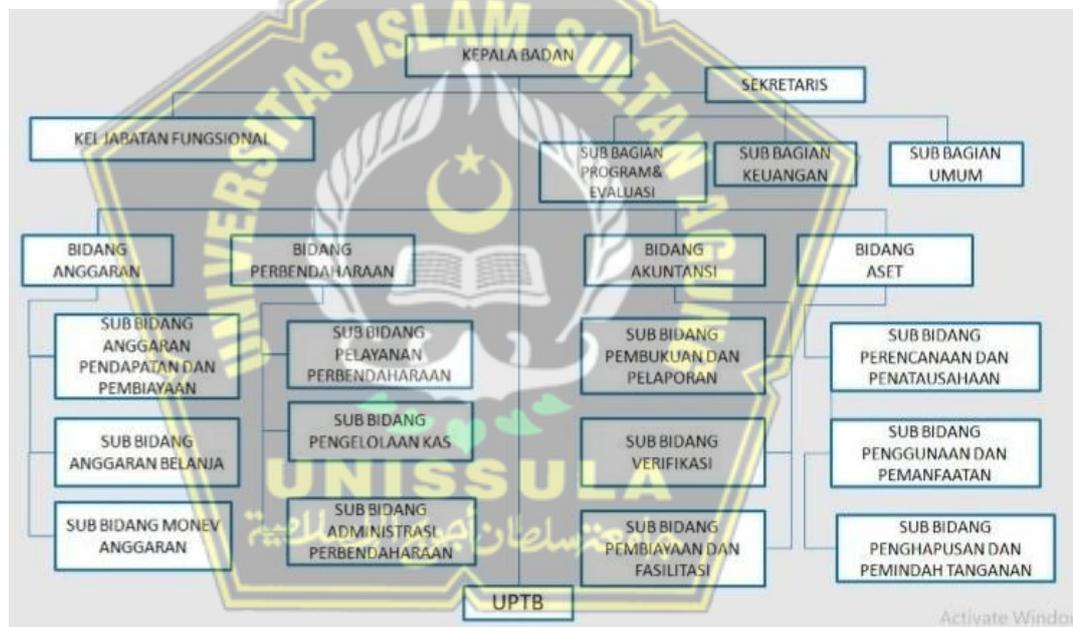
1. Meningkatkan pelayanan keuangan daerah, manajemen dan sistem/prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan asset/barang daerah:
2. Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) apertur dibidang keuangan dan asset/barang daerah, ,

### **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Perda Nomor 42 Daerah Lamongan Th 2014, berikut ini adalah badan-badan yang membentuk BPKAD Kabupaten Lamongan:

1. Kepala Badan
  - a. SubBagian Umum dan Kepegawaiaan
  - b. SubBagian program
  - c. SubBagian Keuangan
2. Bidang Anggaran
  - a. SubBid Anggaran Belanja
  - b. SubBid Anggran Pendapatan dan Pembiayaan
  - c. Sub Bagian Anggaran Monitoring dan Evaluasi Belanja
3. Bidang Perbendaraan
  - a. SubBag Pengelolaan Kas
  - b. SubBag Pelayanan Perbendaraan
  - c. SubBag administrasi Perbendaraan
4. Bidang Akuntansi

- a. SubBag Fasilitasi dan Pembinaan
  - b. SubBid Verifikasi
  - c. SubBid Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Aset
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan
    - b. Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Aset
  6. Unit Pelaksana Teknis
  7. Kelompok Pejabat Fungsional



**Gambar 1 Struktur Organisasi**

Adapun dengan tugas dan fungsi pejabat yang ada di BPKAD Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai fungsi;
  - a. Pembuatan pedoman teknis Badan.
  - b. Membuat rencana untuk masa depan Agensi.

- c. Pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan kekayaan daerah merupakan contoh pelayanan publik dan pelayanan urusan pemerintahan.
- d. Promosi, koordinasi, manajemen, dan pengawasan proyek dan operasi Badan.
- e. Proses peninjauan Agensi sedang dilaksanakan.
- f. Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh manajemen.

Tanggung jawab kepala Badan meliputi hal-hal berikut:

- a. Kembangkan, awasi, dan terapkan strategi jangka panjang untuk program kerja Badan yang memajukan tujuan dan sasaran menyeluruh kawasan.
- b. Dalam peran ini, akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan program kerja Agensi sesuai dengan bidang tanggung jawab yang ditugaskan kepada Anda.
- c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Dokumen APBD serta mengoordinasikan penyusunan RAPBD, rancangan perubahan APBD, dan sisa perhitungan APBD.
- d. Tanggung jawab untuk mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah.
- e. Memfasilitasi keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran dengan mengoordinasikan pembuatan laporan keuangan daerah.

2. Ada peran untuk Sekretariat.:

- a. Perencanaan tenaga kerja, penganggaran, pelaporan, dan manajemen rumah hanyalah beberapa area di mana kebijakan teknis perlu dirumuskan.
- b. Reformasi administrasi sedang dilaksanakan.
- c. Pemberian arahan, koordinasi, dan kontrol atas operasi dan program divisi.
- d. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.
- e. Melakukan pekerjaan dan fungsi lain yang ditugaskan oleh atasannya,

Spesifik tentang peran sekretariat yakni:

- a. Pembuatan Kebijakan Umum, SDM, Keuangan, dan Perlengkapan, Perencanaan, Koordinasi, Penggerak, dan Pengendalian.
- b. Menggunakan rencana tahunan sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan.
- c. Mengawasi dan mengatur pengiriman dukungan teknis dan administratif ke semua departemen yang terkena dampak.
- d. Kendalikan gambaran besar dengan mengawasi perekrutan dan manajemen pekerja pendukung.
- e. Mengawasi dan mengarahkan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan.

Anggota Sekretariat yakni:

1) Sub Bagian Umum bertanggung jawab atas berbagai hal:

- a. Buat rencana untuk berfungsi sebagai peta jalan untuk melaksanakan proyek di domain umum dan personel.
- b. Mengawasi dan menangani semua bisnis keluarga dan korespondensi.
- c. Mengawasi dan melaksanakan semua tugas perpustakaan dan kearsipan.

- d. Merencanakan dan melaksanakan acara di seluruh agensi dan tugas prosedural
- 2) Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab atas berbagai hal:
- a. Buat jadwal dan rencana operasi tahunan agensi untuk digunakan sebagai referensi saat menyelesaikan pekerjaan.
  - b. Dapatkan dan atur data untuk digunakan dalam merumuskan strategi Agensi.
  - c. Memperoleh dan mengatur data untuk digunakan dalam menulis laporan.
  - d. Perencanaan dan perencanaan program-program Badan di bawah arahan seorang koordinator.
- 3) Sub Bagian Program bertanggung jawab atas berbagai hal:
- a. Buat fase spesifik dari rencana kerja.
  - b. Perencanaan material dan alokasi uang di dalam Badan sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - c. Buat jadwal acara yang direncanakan.
  - d. Mempersiapkan dan melaksanakan penggajian.
3. Bidang Anggaran bertanggung jawab atas berbagai hal:
- a. Penyusun peraturan teknis di bidang tertentu.
  - b. Menyiapkan acara dan inisiatif di lapangan.
  - c. Melatih, mengarahkan, dan memantau pekerjaan manajer bawahan dalam domain yang ditugaskan kepada mereka.
  - d. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.
  - e. Melaksanakan arahan lebih lanjut dari atas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Bidang anggaran bertanggung jawab atas berbagai hal:

- a. Jadwal kegiatan dan acara sesuai dengan tugas yang ditugaskan.
- b. Secara khusus, mereka harus melaksanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tanggung jawabnya.
- c. Menetapkan pedoman prosedural untuk mengelola keuangan dan mengoordinasikan pelaksanaannya.
- d. Meneliti implementasi kebijakan APBD dan pembuatan APBD.

Anggota Bidang anggaran yakni:

- 1) SubBid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- 2) SubBid Anggaran Belanja

4. Bidang Perbendaharaan bertanggung jawab atas berbagai hal:

- a. Buat rencana untuk diikuti untuk melaksanakan tanggung jawab dan peran mereka.
- b. Selesaikan dokumen agar kebijakan dapat dibuat untuk menjalankan tugas perbendaharaan.
- c. Mengelola perbendaharaan dan keuangan perusahaan.
- d. Berkoordinasi dengan departemen terkait untuk memastikan kegiatan dilakukan secara efisien.

Anggota Bidang Perbendaharaan yakni :

- 1) SubBid Pengelolaan Kas Daerah
- 2) SubBid Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan

5. Bidang Akuntansi Dan Asset bertanggung jawab atas berbagai hal:

- a. Pengaturan Teknis di Lapangan

- b. Menempatkan rencana dan inisiatif ke dalam tindakan di lapangan.
- c. Melatih, mengarahkan, dan mengawasi operasi sub-direktur juga merupakan bagian dari uraian tugas.
- d. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.
- e. Melaksanakan arahan lebih lanjut dari atas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Bidang akuntansi bertanggung jawab atas berbagai hal;

- a. Buat rencana untuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan tanggung jawab mereka.
- b. Secara khusus, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan operasionalisasi rencana kerja.
- c. Dapatkan efek yang diinginkan melalui penerapan peraturan dan pengawasan sektor keuangan.
- d. Berkoordinasi dengan organisasi terkait untuk memastikan tugas dilaksanakan secara efisien.

Anggota Bidang Akuntansi Dan Asset yakni :

- 1) Sub Bidang Akuntansi bertanggung jawab atas berbagai hal;
  - a. Membuat rencana kerja sebagai pedoman/pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab dan peran masing-masing.
  - b. Selesaikan dokumen sehingga kebijakan pengelolaan kas dapat dirumuskan dan dilaksanakan.
  - c. Bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem dan proses akuntansi kas

daerah.

- d. Dokumentasikan dan urutkan hal-hal sesuai dengan karakteristik masuk dan keluarnya.

Bidang akuntansi bertanggung jawab atas berbagai hal;

- a. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif dengan bantuan kegiatan dan program yang direncanakan dengan hati-hati.
- b. Menindaklanjuti pelaksanaan rencana kerja sesuai tanggung jawab yang diberikan.
- c. Untuk mencapai keberhasilan, industri keuangan harus terus dikelola dan diawasi secara efektif.
- d. Tugas lebih mungkin diselesaikan dengan sukses bila dikoordinasikan dengan entitas eksternal.

2) Sub Bidang Asset bertanggung jawab atas berbagai hal:

- a. Pengaturan Teknis di Lapangan
- b. Menempatkan inisiatif ke dalam tindakan di lapangan.
- c. Melatih, mengarahkan, dan mengawasi operasi sub-direktur juga merupakan bagian dari uraian tugas.
- d. Menyiapkan sistem untuk melacak dan menilai kemajuan dalam program.
- e. Melaksanakan arahan lebih lanjut dari atas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Bidang aset bertanggung jawab atas berbagai hal:

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab, rencanakan program dan kegiatan yang sesuai.

- b. Secara khusus, mereka harus melaksanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tanggung jawab mereka.
  - c. Implementasi dan koordinasi kebijakan teknis manajer aset
  - d. Melacak semua wilayah properti berwujud dan tidak berwujud
  - e. Awasi hal-hal, lihat apa yang terjadi, dan beri tahu orang-orang bagaimana hasilnya.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Alat kebijakan utama Pemerintah Daerah adalah APBD. APBD adalah alat kebijakan yang membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan efisiensinya sendiri. Anggaran adalah alat manajemen dan kebijakan ekonomi yang membantu menjaga agar setiap orang tetap jujur. Anggaran negara adalah alat kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa semua warga negara berbagi hasil kerja negara secara adil. Istilah "anggaran" diciptakan oleh Mahsun (2016: 145) untuk menggambarkan perencanaan keuangan jangka panjang yang biasanya mencakup satu tahun kalender dan dilambangkan secara moneter (Lestari & Shara, 2021)

Adapun tentang anggaran dan realisasi di BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021:

***Tabel 2. 1 Anggaran Dan Realisasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021***

Kode	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	477.998.311.040,00	604.587.635.067,78	126,48
4.1.1	Pajak Daerah	137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	97,68
4.1.2	Retribusi Daerah	16.669.687.900,00	14.295.271.274,00	85,76
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	95,74
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	303.703.523.870,00	436.711.582.454,73	143,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.329.340.517.358,00	2.249.492.084.740,00	96,57
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.028.734.081.396,00	2.021.549.509.887,00	99,65
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	300.606.435.962,00	227.942.574.853,00	75,83
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	165.408.817.106,00	120.940.216.712,73	73,12
4.3.1	Pendapatan Hibah	52.944.338.106,00	14.431.221.275,00	27,26
4.3.2	Dana Darurat	12.285.000.000,00	6.329.516.437,73	51,52
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.179.479.000,00	100.179.479.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.972.747.645.504,00	2.975.019.936.520,51	100,08
5	BELANJA DAERAH	3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	94,98
5.1	BELANJA OPERASI	2.023.363.766.515,00	1.911.338.698.892,07	94,46
5.1.1	Belanja Pegawai	1.016.297.086.133,00	980.281.672.747,00	96,46
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	777.126.626.809,00	706.748.069.748,07	90,94
5.1.5	Belanja Hibah	217.794.386.573,00	212.397.406.497,00	97,52
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.145.667.000,00	11.911.549.900,00	98,07
5.2	BELANJA MODAL	356.325.074.428,00	327.391.789.305,79	91,88
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.307.087.115,00	117.818.225.581,72	96,33

5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.872.096.337,00	58.426.028.680,18	88,70
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.337.491.956,00	135.958.909.722,89	89,84
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.150.553.528,00	12.149.605.228,00	99,99
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.657.845.492,00	3.039.020.093,00	65,25
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	64,62
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	19.385.935.437,00	64,62
5.4	BELANJA TRANSFER	612.983.251.167,00	612.891.459.166,70	99,99
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.961.299.527,00	15.934.507.526,70	99,83
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	597.021.951.640,00	596.956.951.640,00	99,99
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.022.672.092.110,00	2.871.007.882.801,56	94,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.924.446.606,00)	104.012.053.718,95	(208,34)
	PEMBIAYAAN DAERAH	49.924.446.606,00	51.075.446.606,49	102,31
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.424.446.606,00	53.575.446.606,49	102,20
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.424.446.606,00	51.424.446.606,49	100,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	2.151.000.000,00	215,10
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	49.924.446.606,00	51.075.446.606,49	102,31
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	155.087.500.325,44	-

**Tabel 2. 2 Aktivitas kegiatan magang di BPKAD Kabupaten Lamongan Bulan Februari-Juni 2022**

Bulan	Jenis kegiatan yang dilakukan
Februari	Menginput data simpanan wajib koprasinya BPKAD kabupaten lamongan di bulan januari dan february
	Membuat berita acara serah terima tanah dan kendaraan.
	Membuat format DPA di Excel
Maret	Melacak surat dalam buku agenda.
	Melakukan pendistribusian surat
	Memisakan struk BBM guna memuahkan pengimputan
	Mengarsip dan mengedarkan surat deposisi
	Check surat tugas berdasarkan tanggalnya
	Menyesuaikan kegiatan yang ada di BPAD
April	Mencocokkan kartu inventaris barang
	Menginput simpan pinjam koprasinya BPKAD kabupaten lamongan di bulan april
	Membuat bukti transaksi
	Membantu menyusun dokumen kegiatan
Mei	Membantu menyusun laporan realisasi
	Membantu menyusun berkas-berkas pengeluaran kas
	Mendistribusikan surat
	Pendataan nomer pelat kendaraan dinas
Juni	Menyotir penyimpanan arsip yang tidak sesuai berdasarkan tanggal
	Mengarsip dan mengedarkan deposisi
	Pengadaan dokumen

	Membuat bukti transaksi
--	-------------------------



## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **3.1 Identifikasi masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan**

Permasalahan, sangatlah umum didalam sebuah organisasi, instansi, maupun perusahaan akan tetapi sebuah permasalahan tersebut bisa dijadikan sebuah evaluasi yang berguna untuk pembelajaran agar sebuah instansi beroperasi lebih baik lagi kedepannya. BPKAD Kabupaten Lamongan, tempat pemagangan selesai. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang sangat menarik untuk didiskusikan. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai aspek dan bidang, diantaranya:

1. Sistem informasi pemerintah daerah

(SIPD) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat, menatausahakan, dan mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat dibagikan kepada publik dan digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintahan. Pada dasarnya SIPD yang merupakan sistem yang digunakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan, bahkan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia sudah memiliki fitur-fitur yang memudahkan proses input dan output yang baik. Akan tetapi, pada saat proses input dilakukan urgensi permasalahan pun muncul.

Dimana saat melaksanakan kegiatan input transaksi, mendokumentasikan dan mengelola data, SIPD sering mengalami troublem. Seperti di sebuah kegiatan, dimana saat kegiatan penginputan transaksi dari berbagai kegiatan sistem sering not-responding dan nge blank. Hal ini terjadi dimana ketika sebuah sistem informasi ini jika di timpa sebuah data yang harus diinput dengan kuantitas yang banyak dan dengan waktu bersamaan, hal ini tidak bisa terelakan.

Hal ini membuat berkas-berkas yang akan di inputkan ke sistem informasi pemerintahan daerah menumpuk, dan jika terus berkelanjutan seperti itu akan berdampak ke kualitas Laporan Keuangan. Dimana salah satu faktor kualitas Laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Lamongan ialah ketepatan pelaporan Laporan Keuangan.

Seperti hal ini, mau tidak mau pejabat yang bertugas harus merelakan waktu istirahatnya untuk menginput berkas-berkas laporan tersebut. Jika tidak melakukan waktu pelaporan Laporan Keuangan akan tertunda sehingga kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Lamongan menjadi rendah.

## 2. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kompetensi SDM organisasi merupakan faktor utama dalam kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu tanggung jawab utama SDM di instansi pemerintah adalah memastikan bahwa instansi tersebut hanya menerima layanan dengan kualitas terbaik, sehingga instansi pemerintah mempertahankan reputasinya yang sempurna

untuk keunggulan dan transparansi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa para pemimpin dan pegawai pemerintah memiliki keahlian SDM di semua tingkat manajemen. Urgensi permasalahan SDM yang ada di BPKAD Kabupaten Lamongan belum mengarah pada peningkatan kinerja kepegawaiaan yang disebabkan oleh pindah tugasnya pegawai, pegawai tersebut yang sebelumnya adalah staf tenaga kontrak di BPKAD Kabupaten Lamongan tetapi dia melakukan tes dan diterima menjadi CPNS di kabupaten Semarang Jawa Tengah, pegawai tersebut memiliki pendidikan D3 akuntansi namun memiliki skill yang tidak semua pegawai bisa ditugaskan di bagian tersebut yaitu di bagian pengurus barang di kantor BPKAD Kabupaten Lamongan. Pada dasarnya posisi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam pelaporan barang. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab Bagian SDM BPKAD Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai lainnya agar peran mereka dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Ini termasuk melakukan upaya untuk melatih pekerja agar menjadi lebih mahir dalam pekerjaan mereka sehingga karyawan baru dapat menghindari keharusan mempelajari prosedur yang membosankan.

### 3. Keuangan

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan bisa dikatakan mengalami naik turun, struktur APBD di Kabupaten Lamongan masih sangat bergantung pada subsidi atau bantuan dari

pemerintah pusat. Dalam menjalankan kegiatan menyusun anggaran yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lamongan belum melaksanakan perhitungan rasio tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel di atas. Peneliti penasaran bagaimana kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan di wilayah yang dicakup oleh BPKAD Kabupaten Lamongan untuk mengetahui apa yang terjadi pada kinerja keuangan Kabupaten Lamongan yang menyebabkan perubahan tersebut.



## **BAB IV**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **4.1 Laporan Keuangan**

##### **4.1.1 Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2016) pada (Tanan & Duri, 2018) “Laporan keuangan memberikan fungsi penting dengan memberikan akses kepada pemangku kepentingan ke data moneter penting yang dapat digunakan dalam berbagai konteks pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Laporan keuangan yang tersedia untuk publik merupakan sumber yang berharga untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan. Laporan keuangan yang tersedia untuk umum (laporan keuangan tujuan umum) tidak disesuaikan dengan tuntutan audiens tertentu. Dengan demikian, lebih banyak analisis dari laporan keuangan ini diperlukan untuk membuatnya bermakna dan berguna untuk pengambilan keputusan dan penilaian dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan menyediakan data untuk berbagai jenis analisis.”.

##### **4.1.2 Kinerja Keuangan**

Menurut Sianturi (2020), kinerja keuangan perusahaan merupakan penjelasan status keuangan perusahaan dengan menggunakan metodologi analisis keuangan, dengan perhatian khusus pada bagaimana keuangan perusahaan berubah dari waktu ke waktu, khususnya, merepresentasikan keberhasilannya selama jangka waktu tertentu. Rhamadana & Triyonowati (2016) Kinerja keuangan sebagian besar tergantung pada kualitas manajemen

yang dipakai agar tercapainya tujuan suatu bisnis. Maka dari itu, untuk mengukur kinerja keuangan perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan. (Amelya et al., 2021).

Sutrisno (2011: 176-178) berikut adalah beberapa variabel yang berperan dalam produktivitas:

1. Kemanjuran dan produktivitas Meskipun diberi label tidak efektif, suatu tindakan dapat dianggap berhasil jika mengarah pada realisasi hasil yang diinginkan, bahkan jika hasil tersebut bukan motivasi utama untuk melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya tidak penting atau tidak penting, maka tindakan tersebut efisien.
2. Dalam organisasi formal, otoritas mengacu pada kepemilikan hak untuk berkomunikasi atau mengeluarkan perintah kepada anggota organisasi lainnya sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tingkat tanggung jawab penerima dan nilai kontribusi mereka.
3. Disiplin mengacu pada upaya karyawan untuk menegakkan ketentuan kontrak kerja mereka dengan majikan mereka.
4. Inisiatif, dalam konteks ini, berarti kekuatan dibalik gerak maju yang mencoba mempengaruhi output.

Ada 3 tujuan yang dapat dicapai melalui pengukuran kinerja sektor publik. Untuk memulai, tujuan mengukur kinerja di sektor publik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada tujuan unit kerja individu dengan bantuan ukuran kinerja. Pelayanan yang diberikan oleh entitas pemerintah kepada masyarakat

menjadi lebih efisien dan efektif. Kedua, keputusan dan investasi di sektor publik diinformasikan oleh metrik kinerja. Ketiga, pengukuran kinerja di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan dan mewujudkan akuntabilitas publik (Tanan & Duri, 2018).

#### **4.1.3 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah**

Sinambela, Saragih, dan Sari (2018) menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dengan pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk membagi sumber daya dan menyelesaikan masalah, untuk meningkatkan dialog kelembagaan dan akuntabilitas publik.

#### **4.1.4 Manfaat Kinerja Keuangan Daerah**

Dewi (2018) menyebutkan 5 keuntungan mengukur efektivitas instansi pemerintah dengan menggunakan pengukuran kinerja.

- 1) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu.

Ketika hasil dikuantifikasi, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Keputusan pemerintah seringkali dibatasi oleh informasi yang tersedia, faktor politik yang bersaing, dan tekanan dari kepentingan khusus. Pemerintah akan dapat menentukan misinya dan menetapkan tujuannya untuk mendapatkan hasil tertentu melalui proses menghasilkan ukuran kinerja tersebut. Untuk mengevaluasi kemandirian inisiatif yang sudah ada, berbagai alat pengukur kinerja tersedia untuk digunakan. Sebaliknya, pengukuran kinerja memungkinkan badan legislatif untuk mempertimbangkan

proposal program baru, mengevaluasi efisiensi pelaksanaan program yang sudah ada, dan memperhatikan hasil yang benar-benar dicapai.

2) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Ketika hasil diukur dengan cara ini, semua orang di pemerintahan, dari birokrat terendah hingga pejabat tertinggi, akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu, lini teratas akan bertanggung jawab kepada badan pembuat undang-undang. Manajemen berdasarkan tujuan adalah contoh yang baik dari metode penilaian standar yang dapat digunakan dalam konteks ini untuk mengevaluasi hasil.

3) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman, sangatlah penting untuk keberhasilan sistem penilaian kinerja yang kompeten bahwa evaluasi kinerja pemerintah dipublikasikan. Ada kecenderungan yang berkembang ke arah partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan, dan penekanan yang lebih besar ditempatkan pada hasil program.

4) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan

Perencanaan dan tujuan strategis akan sia-sia jika tidak ada cara untuk melacak seberapa baik implementasinya. Tidak akan ada

evaluasi objektif tentang kemanjuran program tanpa adanya metrik tersebut.

- 5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas.

Cari tahu cara memaksimalkan sumber daya. Orang menjadi lebih kritis tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang mereka untuk isu-isu yang mereka pedulikan.

#### 4.1.5 Rasio Keuangan

Rasio keuangan menurut Hanadie adalah penjumlahan yang menggambarkan keterkaitan antara satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan; rasio ini mengungkapkan hubungan antara komponen laporan menggunakan bentuk matematika langsung (Riana & Diyani, 2016). Irham Fahmi (2012) pada (Aringga. et al., 2017) juga menjelaskan bahwasannya “Istilah rasio digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara dua nilai numerik; khususnya, perbandingan antara dua jumlah dengan tujuan akhir untuk menentukan jawaban yang dapat digunakan dalam latihan analitis dan deliberatif lebih lanjut”.

Berdasarkan teori diatas, rasio keuangan yakni hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lain di dalam sebuah laporan keuangan yang bertujuan untuk membandingkan suatu jumlah dengan jumlah lainnya.

Rasio keuangan berikut digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah:

- 1) Rasio Efektivitas

Menurut Faud (2016: 140), rasio efektivitas mengukur sejauh mana suatu yurisdiksi memenuhi tujuan keuangannya mengingat potensi sebenarnya untuk melakukannya.

## 2) Rasio Efisiensi

Membutuhkan lebih sedikit sumber daya dari perusahaan adalah salah satu cara untuk mendefinisikan efisiensi. Akibatnya, kita dapat menyatakannya sebagai rasio hasil terhadap sebab. Menurut Faud (2016:140), efisiensi dapat ditentukan dengan cara membandingkan jumlah kerja yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Menilai efektivitas inisiatif pengumpulan pajak, pemerintah daerah biasanya menghitung total biaya realisasi semua pendapatan. Menjadi efisien adalah berada dalam keadaan di mana upaya seseorang untuk menyelesaikan tugas dimaksimalkan dan tugas diselesaikan secara akurat dan efektif.

## 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Faud (2016:138), rasio kemandirian mencirikan seberapa besar ketergantungan suatu daerah pada dana dari tempat lain. Ketika rasio kemandirian di suatu daerah tinggi, itu berarti kurang bergantung pada pemerintah federal dan negara bagian untuk dukungan keuangan, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga

mencirikan sejauh mana sebuah kota memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah; ada yang berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak dan retribusi secara adil jika rasio kemandirian tinggi.

#### 4) Rasio Aktivitas

Alokasi anggaran baik untuk biaya operasi normal maupun peningkatan modal dapat memberikan perkiraan kasar tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Hanik & Karyanti, 2014). Persentase ini mewakili kepentingan relatif yang ditempatkan pemerintah daerah dalam membelanjakan uang untuk operasi sehari-hari dan investasi jangka panjang. Ketika lebih banyak uang dihabiskan untuk pemeliharaan dan biaya berulang lainnya, lebih sedikit yang tersedia untuk investasi jangka panjang dalam ekonomi masyarakat melalui pengeluaran pembangunan.

#### 5) Rasio Pertumbuhan

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan dan mengembangkan keberhasilannya dari waktu ke waktu diukur dengan rasio ini (Susanto, 2019), mencari tahu peluang mana yang layak dikejar dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran secara terpisah.

## **BAB V**

### **METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA**

#### **5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis. Proses dalam metode ini lebih fokus dalam penelitian kualitatif yaitu sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan kata lain, peneliti dalam penelitian ini tidak mengumpulkan sendiri data langsung dari lapangan; sebaliknya, mereka mengandalkan data sekunder, atau data yang telah dikumpulkan. Menganalisis informasi yang sudah ada, bukan mengumpulkan informasi baru melalui metode seperti wawancara, survei, dan metode lainnya, dikenal sebagai analisis data sekunder.

#### **5.2 Subjek dan Objek Lapangan**

Berbeda dengan eksperimen, penelitian ini mengandalkan pendekatan penelitian kualitatif, yang didefinisikan sebagai penelitian di mana peneliti sendiri berfungsi sebagai alat pengumpulan data primer (Maulida, 2022). Penelitian ini berfokus pada masukan dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang dihadapi oleh organisasi. Pembimbing pendamping pemagangan MBKM, serta informasi tambahan, terutama dalam bentuk data, menjadi subjek dari informasi yang disajikan.

Objek penelitian ini Pada BPKAD Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

### **5.3 Data dan Metode Pengumpulan Data**

#### **5.3.1 Sumber Data**

Permasalahan yang dibahas dalam laporan kegiatan magang akan dianalisis dengan menggunakan data yang dikumpulkan terkait dengan isu-isu yang ada di lokasi magang. Data yang digunakan di sini bersifat sekunder yaitu data realisasi pendapatan, anggaran pendapatn, realisasi belanja daerah, realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, total pendapatan, pendapatan tahun sebelumnya dan pendapatan tahun selanjutnya.

#### **5.3.2 Metode Pengumpulan Data**

Laporan magang ini mencakup wawancara dan dokumen tertulis sebagai sumber informasi utama. Wawancara ini merupakan percakapan tatap muka dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan dan responden atau informan atau sumber data memberikan jawaban. Wawancara mendalam dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai narasumber. Informasi tambahan yang digunakan untuk menyusun laporan magang ini berasal dari catatan resmi. Yang dimaksud dengan “dokumentasi” adalah proses pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, tergambar, atau monumental tentang kejadian-kejadian sejarah yang digunakan sebagai sumber penelitian.

### **5.4 Analisis Data**

Yang dimaksud dengan “analisis data” adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkategorikan data, mendeskripsikan data menjadi satuan-satuan, mensintesis data, menyusun data menjadi pola, memilih data mana yang paling penting, dan menarik kesimpulan dari data dengan cara yang mudah dipahami oleh analis dan audiens. Data penelitian ini akan dianalisis dengan menghitung rasio keuangan daerah berdasarkan analisis tren berbasis persentase.

#### 5.4.1 Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pengambilan dan pemilihan detail mana yang akan disorot. Untuk mengetahui permasalahan kinerja keuangan daerah, penelitian ini akan menggunakan strategi reduksi data berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber primer lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penentuan rasio keuangan daerah yakni Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, rasio Aktivitas, Rasio kemandirian dan Rasio Pertumbuhan.

##### 1. Rasio Efektivitas

Rumus perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten lamongan beserta kriteria dalam perhitungannya

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif

90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber :Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam Susanto (2014) (Susanto, 2019)

## 2. Rasio Efisiensi

Berikut ini yakni perhitungan dan kriteria dalam perhitungan Rasio Efisiensi keuangan daerah Kabupaten Lamongan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber :Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam Susanto (2014) (Susanto, 2019)

## 3. Rasio Kemandirian

Berikut ini yakni rumus Rasio Kemandirian daerah kabupaten Lamongan beserta kriterianya

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

Presentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,00-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Baik
40,01-50,00	Cukup
Kurang dari 50,00	Sangat Baik

Sumber :Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam dalam Susanto (2014) (Susanto, 2019)

#### 4. Rasio Aktivitas

Berikut rumus beserta kriteria dalam perhitungan Rasio Aktivitas keuangan daerah Kabupaten Lamongan

$$\text{Rumus} \frac{\text{Total Belanja Oprasional}}{\text{Total belanja Daerah}} 100\%$$

$$\text{Rumus} \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} 100\%$$

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 - 50%	Tidak Baik
50% - 100%	Baik

Sumber : (Zuhri & Soleh, 2016)

#### 5. Rasio Pertumbuhan

Berikut ini rumus perhitungan rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Lamongan

$$\text{Rumus} \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} 100\%$$

Selanjutnya akan dilaksanakan analisis dan pembahasan mengenai perhitungan rasio keuangan daerah Kabupaten Lamongan dan hasil perhitungan data analisis perhitungan tersebut akan di jelaskan dalam bentuk tabel supaya dapat di pahami dengan mudah.

#### **5.4.2 Penyajian Data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yakni penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi ringkas. Informasi berupa persentase dapat diperoleh dari data setelah diolah dengan perhitungan rasio keuangan daerah dan perhitungan analisis kecenderungan. Temuan-temuan tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel, dilengkapi dengan penjelasan yang lebih deskriptif untuk membantu pemahaman. Penyajian data penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti mengenal dan menggunakan data lapangan.

#### **5.4.3 Penarikan kesimpulan**

Membuat kesimpulan atau melakukan verifikasi adalah tahap ketiga dari analisis data. Temuan awal ini bersifat sementara dan dapat direvisi jika pengumpulan data tambahan tidak didukung oleh informasi yang tersedia. Kesimpulan data memberikan solusi atas pernyataan masalah yang diajukan di awal, dan itu dilakukan dalam bentuk deskripsi atau deskripsi tentang hal yang

diteliti. Dalam analisis ini, peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan kinerja keuangan berbagai pemerintah kota.



## **BAB VI**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan wawasan tentang masalah dan peluang yang disorot dalam laporan keuangan. Sementara analisis rasio telah diterapkan di beberapa perusahaan swasta, penerapannya di sektor publik, khususnya terkait APBD, masih terbatas.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dievaluasi, seperti dikemukakan oleh Supatro (2011), melalui pemeriksaan rasio APBD yang telah ditetapkan (Novianti et al., 2018)

Namun demikian, penyelenggaraan keuangan daerah yang terbuka, jujur, demokratis, efisien, dan bertanggung jawab memerlukan analisis rasio APBD. Berikut ini adalah contoh rasio yang berguna: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

#### **1. Rasio Efektifitas**

Ketika membandingkan PAD yang diantisipasi dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi pendapatan daerah, rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai PAD. Daerah efisien adalah daerah yang memiliki rasio pencapaian paling sedikit 1 (satu) atau 100% yang menunjukkan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan.

Perhitungan rasio efektivitas Pemerintahan Kabupaten lamongan adalah sebagai berikut.

2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{429.200.063.876,82}{436.519.037.265,60} \times 100\% \\ &= 98,32\% \end{aligned}$$

2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{241.118.418.614,99}{471.567.901.740,00} \times 100\% \\ &= 51,13\% \end{aligned}$$

2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{472.002.823.163,86}{517.168.711.905,00} \times 100\% \\ &= 91,26\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{481.759.328.988,51}{483.583.044.116,57} \times 100\% \\ &= 99,62\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{604.587.635.067,78}{477.998.311.040,00} \times 100\% \\ &= 126,48\% \end{aligned}$$

Tahun	Realisasi Pendapatan(pad)	Anggaran Pendapatan(pad)	Presentase (%)
2017	429.200.063.876,82	436.519.037.265,60	<b>98,32</b>
2018	241.118.418.614,99	471.567.901.740,00	<b>51,13</b>
2019	472.002.823.163,86	517.168.711.905,00	<b>91,26</b>
2020	481.759.328.988,51	483.583.044.116,57	<b>99,62</b>
2021	604.587.635.067,78	477.998.311.040,00	<b>126,48</b>

*Tabel 6. 1 Rasio Efektivitas*

Tabel diatas menunjukkan perkembangan rasio efektivitas kabupaten Lamongan yang di tunjukan tabel di atas dengan hasil rata-rata 93,36% selama kurang waktu selam 5 tahun anggaran.

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Lamongan yakni tepatnya diawali pada tahun 2017 rasio efektivitas yakni 98,32% dan pada tahun 2018 menurun jadi 51,13% pada tahun ini pemerintahan kabupaten lamongan yang memiliki anggaran (PAD) 471.567.901.740,00 dan haya terealisasi sebesar 241.118.418.614,99 maka dari itu tingkat rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten lamongan tergolong tidak efektif di tahun 2018 ini dikarenakan realisasinya hasil pajak daerah sebesar 68.773.191.929,18 dan retribusi daerah sebesar 7.068.167.993,00 sangatlah kecil dibandingkan untuk anggaranya hasil pajak daerah sebesar 157.275.812.000,00 sedangkan hasil retribusi daerah sebesar 17.132.670.212,00. kemudian pada tahun kemudian pada tahun 2019 sebesar 91,26% untuk tahun ini realisasi pendapatan sebesar 472.002.823.163,86 kemudian anggaran pendapatan sebesar 517.168.711.905,00 sehingga hampir seimbang maka dari itu rasio

efektivitas keuangan daerah tergolong efektif karena hasil pajak dan retribusi daerah hampir mencapai target yang dianggarkan karena untuk menilai efektifitas di lihat juga dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 menjadi 99,62% yang memiliki anggaran 483.585.044.116,57 untuk realisasinya sebesar 481.759.328.988,51 dimana realisasinya hampir sama dengan anggaran yang ditentukan dan pada tahun 2021 sebesar 126,48% ditahun 2021 ini memiliki kriteria efektivitas sangat efektif dikarenakan memiliki realisasi yang melonjak tinggi sebesar 604.587.635.067,78 di bandingkan dengan anggrannya yaitu sebesar 477.998.311.40,00. Dalam analisis rasio efektivitas, secara umum dapat diterima bahwa kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dianggap efektif apabila rasio yang diperoleh paling sedikit 1 (satu) dan paling tinggi 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin mampu area tersebut.

Pemerintah daerah dalam APBD mahir dalam mengelola rencana dan merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah, yang berkontribusi pada konsistensi rasio efisiensi ini. Penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah masih jauh dari proyeksi.

## **2. Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi yang diperoleh pemerintah dapat dibandingkan dengan rasio efektivitas untuk menghasilkan nilai relatif. Rasio efisiensi mengevaluasi seberapa baik laba menutupi biaya operasi.

2017

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.729.589.182.635,60}{2.716.042.671.044,82} \times 100\%$$

$$= 100,49\%$$

2018

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.372.912.129.776,00}{1.665.458.244.482,99} \times 100\%$$

$$= 82,43$$

2019

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.302.768.392.919,60}{2.864.496.711.416,86} \times 100\%$$

$$= 80,38\%$$

2020

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.823.137.926.114,77}{2.838.279.209.371,51} \times 100\%$$

$$= 99,46\%$$

2021

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.871.007.882.801,56}{2.975.019.936.520,51} \times 100\%$$

$$= 96,50\%$$

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Presentase (%)

2017	2.729.589.182.635,60	2.716.042.671.044,82	<b>100,49</b>
2018	1.372.912.129.776,00	1.665.458.244.482,99	<b>82,43</b>
2019	2.302.768.392.919,60	2.864.496.711.416,86	<b>80,38</b>
2020	2.823.137.926.114,77	2.838.279.209.371,51	<b>99,46</b>
2021	2.871.007.882.801,56	2.975.019.936.520,51	<b>96,50</b>

*Tabel 6. 2 Tabel Rasio Efisiensi*

Berdasarkan tabel berikut menunjukkan rasio efisiensi pada tahun 2017 sampai tahun 2021 berada ditingkat rata-rata 91,85 untuk rincian sebagai berikut. Untuk di tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 100,49% hal tersebut belum dikatakan tidak efisien karena di tahun 2017 output memiliki nilai yang tinggi sebesar 2.729.589.182.635,60 dibandingkan nilai inputnya sebesar 2.716.042.671.044,82, untuk tahun 2018 sebesar 82,43% nilai tersebut dalam kriteria dikatakan cukup efisien dibandingkan ditahun 2017 dimana tahun 2018 memiliki output sebesar 1.372.912.129.776,00 sedangkan inputnya sebesar 1.665.458.244.482,99 untuk selanjutnya di tahun 2019 sebesar 80,38% hal tersebut memiliki kriteria cukup dalam menilai sebuah efisiensi karena input pada saat itu dari pemerintah daerah kabupaten lamongan memiliki nilai sebesar 2.864.496.711.416,82 lebih besar sedikit dari output sebesar 2.302.768.392.919,60, untuk tahun 2020 sebesar 99,46% di dalam kriteria dikatakan masih kurang efisien karena masih memiliki realisasi belanja sebesar 2.823.137.926.114,77 adapun untuk realisasi pendapatannya sebesar 2.838.279.209.371,51 dan untuk tahun terakhir di tahun 2021 sebesar 96,50% dimana tahun ini memiliki

realisasi belanja sebesar 2.871.007.882.801.56 yang memiliki nilai tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Data berikut merupakan rasio efisiensi pemerintah kabupaten Lamongan tahun 2017-2021 yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut kurang efisien dibandingkan dengan rata-rata nasional. Keberhasilan yang diukur dalam persentase menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamongan belum mempraktekkan tingkat efisiensi yang ideal dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerahnya, terlihat dari porsi pendapatan PAD yang lebih besar dibandingkan penerimaannya.

### 3. Rasio kemandirian

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Semakin besar derajat otonomi suatu masyarakat, semakin besar pula bagian pajak dan retribusi daerahnya. Karena semakin banyak orang di area tertentu yang ikut membayar pajak dan biaya lokal mereka secara adil, semua orang mendapat manfaat dan kebutuhan daerah untuk bergantung pada bantuan federal atau provinsi berkurang. Persentase otonomi fiskal yang dinikmati oleh pemerintah daerah ditentukan.

2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{429.200.063.876,82}{2.716.042.671.044,82} \times 100\% \\ &= 15,80\% \end{aligned}$$

2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{241.118.418.614,99}{1.665.458.244.482,99} \times 100\% \\ &= 14,47\% \end{aligned}$$

2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{472.002.823.163,86}{2.864.496.711.416,86} \times 100\% \\ &= 16,47\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{481.759.328.988,51}{2.838.279.209.371,51} \times 100\% \\ &= 16,97\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{604.587.635.067,78}{2.975.019.936.520,51} \times 100\% \\ &= 20,32\% \end{aligned}$$

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Presentase (%)
2017	429.200.063.876,82	2.716.042.671.044,82	<b>15,80</b>
2018	241.118.418.614,99	1.665.458.244.482,99	<b>14,47</b>
2019	472.002.823.163,86	2.864.496.711.416,86	<b>16,47</b>
2020	481.759.328.988,51	2.838.279.209.371,51	<b>16,97</b>
2021	604.587.635.067,78	2.975.019.936.520,51	<b>20,32</b>

*Tabel 6. 3 Tabel asioKemandirian*

Rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir adalah 16,80%, sehingga masuk dalam kelompok yang lebih kecil dari grafik rasio kemandirian yang disajikan di atas. Meskipun tumbuh, PAD masih merupakan bagian yang relatif kecil dari total penerimaan APBD, jauh dari bagian yang dicatat oleh Bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat. Status ini mencerminkan ketergantungan Kabupaten Lamongan yang terus menerus pada Pemerintah Provinsi/Pusat dan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan warganya secara memadai.

#### 4. Rasio Aktifitas

Rasio Aktivitas menunjukkan bagaimana pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran mereka antara biaya operasional dan peningkatan modal. Untuk tahun 2017-2021, tabel di bawah ini menjelaskan porsi belanja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

##### 1. Rasio belanja oprasi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan

2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Aktivitas} &= \frac{1.619.390.905.772,10}{2.729.589.182.635,60} \times 100\% \\ &= 59,32\% \end{aligned}$$

2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Aktivitas} &= \frac{891.545.397.255,00}{1.372.912.129.776,00} \times 100\% \\ &= 64,93\% \end{aligned}$$

2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Aktivitas} &= \frac{1.812.335.676.455,50}{2.302.768.392.919,60} \times 100\% \\ &= 78,70\% \end{aligned}$$

2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Aktivitas} &= \frac{1.775.858.044.244,00}{2.823.137.926.114,77} \times 100\% \\ &= 62,90\% \end{aligned}$$

2021

$$\begin{aligned} \text{Rasio Aktivitas} &= \frac{1.911.338.698.892,07}{2.871.007.882.801,56} \times 100\% \\ &= 66,57\% \end{aligned}$$

Tahun	Total Belanja Daerah	Total belanja Oprasi	Presentase (%)
2017	2.729.589.182.635,60	1.619.390.905.772,10	<b>59,32</b>
2018	1.372.912.129.776,00	891.545.397.255,00	<b>64,93</b>
2019	2.302.768.392.919,60	1.812.335.676.455,50	<b>78,70</b>

2020	2.823.137.926.114,77	1.775.858.044.244,00	<b>62,90</b>
2021	2.871.007.882.801,56	1.911.338.698.892,07	<b>66,57</b>

*Tabel 6. 4 Tabel Rasio Aktivitas*

Terlihat dari tabel di atas bahwa tipikal rasio kegiatan belanja operasional BPKAD di Kabupaten Lamongan adalah 66,48% hal tersebut memiliki kriteria baik dalam hal belanja oprasi pemerintahan kabupaten lamongan jangka waktu kurang lebih lima tahun anggaran dan realisasi. Dimulai pada tahun 2017 rasio sebesar 59,32% yang memiliki total belanja daerah sebesar 1.619.390.905.772,10 pada tahun 2018 menjadi 64,93% kriteria hal tersebut baik dimana tahun 2018 memiliki total belanja oprasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 891.545.397.255,00, dan mengalami kenaikan lagi menjadi 78,70% hal tersebut dikriteriakan baik dari angka tersebut untuk tahun 2019 dengan total belanja oprasi sebesar 1.812.335.676.455,50. pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 62,90% dengan total belanja oprasi daerah sebesar 1.775.858.044.244,00 dan pada tahun 2021 sebesar 66,57% untuk kriteria pada tahun ini dikatakan baik hal tersebut memiliki total belanja sebesar 1.911.338.698.892,07 bisa dikatakan total belanja oprasi paling tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam tot tahun sebelum-sebelumnya.

## 2. Rasio belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan

2017

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{505.221.589.585,00}{2.729.589.182.635,60} \times 100\%$$

$$= 18,50\%$$

2018

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{167.948.154.390,00}{1.372.912.129.776,00} \times 100\%$$

$$= 12,23\%$$

2019

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{490.432.716.464,10}{2.302.768.392.919,60} \times 100\%$$

$$= 21,29\%$$

2020

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{325.359.777.833,41}{2.823.137.926.114,77} \times 100\%$$

$$= 11,52\%$$

2021

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{327.391.789.305,79}{2.871.007.882.801,56} \times 100\%$$

$$= 11,40\%$$

Tahun	Total belanja Modal	Total belanja Daerah	Presentase (%)
2017	505.221.589.585,00	2.729.589.182.635,60	<b>18,50</b>
2018	167.948.154.390,00	1.372.912.129.776,00	<b>12,23</b>

2019	490.432.716.464,10	2.302.768.392.919,60	<b>21,29</b>
2020	325.359.777.833,41	2.823.137.926.114,77	<b>11,52</b>
2021	327.391.789.305,79	2.871.007.882.801,56	<b>11,40</b>

*Tabel 6. 5 Tabel Rasio Aktivitas*

Tren pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Rata-rata Rasio Kegiatan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lamongan dihitung sebesar 14,98% dari data pada tabel di atas. Setelah mencapai 18,50% di tahun 2017 dengan belanja modal 505.221 589 585, persentasenya turun menjadi 12,23% di tahun 2018 dengan belanja modal hanya Rp 167 948 159 390, kemudian meningkat menjadi 21,29% pada tahun 2019 di tahun ini memiliki total belanja modal sebesar 490.432.716.464,10 untuk tahun 2020 menurun menjadi 11,52% hal ini rasio aktivitas belanja modal tahun 2020 dikriteriakan masih belum baik dimana memiliki belanja modal sebesar 325.359.777.833,41. Dan yang terakhir ditahun 2021 yaitu sebesar 11,40% dimana memiliki total belanja modal sebesar 327.391.789.305,79.

Sebagian besar aset Pemda masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sebagaimana terlihat pada penjelasan dan perhitungan tabel di atas, sehingga menghasilkan rasio belanja modal yang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa biaya operasional seringkali mewakili persentase pendapatan yang jauh lebih besar daripada belanja modal. Tingginya proporsi dana pemerintah yang dialokasikan untuk biaya operasional dapat ditelusuri kembali ke tingginya jumlah lembaga otonom

dan tingginya biaya pemeliharaan tenaga kerja saat ini. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memilih untuk melakukan pembelian normal dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini karena belanja modal Pemkab Lamongan masih rendah atau belum terpenuhi karena belum ada kriteria yang jelas untuk belanja tersebut dan Pemda masih fokus pada belanja operasional.

### 5. Rasio pertumbuhan

Tujuan dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat melanjutkan bahkan memperluas tingkat keberhasilannya dari satu periode ke periode berikutnya tanpa mengandalkan tambahan dana. Dengan menggunakan pertumbuhan PAD sebagai metrik, pembuat kebijakan dapat menilai potensi daerah yang kurang terlayani; semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin besar kemungkinan bahwa pemerintah daerah akan mampu melanjutkan keberhasilannya sebelumnya dan terus berkembang.

2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio pertumbuhan} &= \frac{429.200.063.876,82 - 403.474.462.147,22}{403.474.462.147,22} 100\% \\ &= 63,76\% \end{aligned}$$

2018

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{241.118.418.614,99 - 429.200.063.876,82}{429.200.063.876,82} 100\%$$

$$= 43,82\%$$

2019

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{472.002.823.163,86 - 241.118.418.614,99}{241.118.418.614,99} 100\%$$

$$= 95,75\%$$

2020

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{481.759.328.988,51 - 472.002.823.163,86}{472.002.823.163,86} 100\%$$

$$= 20,67\%$$

2021

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{604.587.635.067,78 - 481.759.328.988,51}{481.759.328.988,51} 100\%$$

$$= 25,49\%$$

Tahun	PAD (t-1)	PAD (t)	Presentase (%)
2016/2017	403.474.462.147,22	429.200.063.876,82	<b>63,76</b>
2017/2018	429.200.063.876,82	241.118.418.614,99	<b>43,82</b>
2018/2019	241.118.418.614,99	472.002.823.163,86	<b>95,75</b>
2019/2020	472.002.823.163,86	481.759.328.988,51	<b>20,67</b>
2020/2021	481.759.328.988,51	604.587.635.067,78	<b>25,49</b>

*Tabel 6. 6 Tabel Rasio Kemandirian*

Analisis matematis menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lamongan tidak memiliki pertumbuhan kinerja yang sangat baik

selama lima tahun terakhir. Hal ini karena seperti terlihat pada tabel di atas, rasio pertumbuhannya belum konsisten tetapi berubah dari tahun ke tahun. Kemampuan pemerintah daerah untuk menekan pengeluaran belanja rutin dan lebih memanfaatkan uang yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan PAD merupakan bukti bahwa pertumbuhan bermanfaat bagi suatu daerah. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengantisipasi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi berbagai industri unggulan, antara lain perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan jasa. Pemda Kabupaten Lamongan telah berjanji dengan tegas untuk memperbaiki iklim investasi dengan membuatnya lebih ramah dan transparan, dengan harapan akan mendorong pelaku usaha untuk mendirikan toko disana.

#### Penilaian

##### Kriteria keuangan kabupaten lamongan

Berdasarkan rasio efektivitas, efesiensi, aktivitas, kemandirian, pertumbuhan  
Tahun 2017-2021

Rasio kinerja keuangan	Kriteria
Rasio efektivitas	Efektif
Rasio efesiensi	Kurang efisien
Rasio aktivitas belanja oprasional	Baik
Rasio aktivitas belanja modal	Tidak baik
Rasio kemandirian	Kurang
Rasio pertumbuhan	Belum stabil

*Tabel 6. 7 Tabel Penilaian Kriteria*

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai rasio keuangan daerah pada APBD pemerintah kabupaten lamongan maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas keuangan pemerintahan Kabupaten Lamongan selama kurang waktu 5 tahun anggaran perkembangan rasio efektivitas di kabupaten Lamongan dikategorikan efektif dengan hasil rata-rata 93,36%. Tingkat presentasi ini dapat di gambarkan bawah keuangan daerah kabupaten lamongan efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan daerah efektif berdasar penilaian efektivitas.
2. Berdasarkan perhitungan hasil rasio efisiensi pemerintah daerah kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2021 berada di rata-rata 91,85. Ini adalah angka yang dianggap tidak efisien. Angka keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan belum optimal, karena pemerintah daerah lebih banyak mengeluarkan dana untuk pengumpulan PAD daripada untuk menghasilkan (output).
3. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2017-2021 dikategorikan masih rendah, karena memiliki rata-rata 16,80%. Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten lamongan

4. memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat atau provinsi
5. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2017 sampai 2021 berdasarakan perhitungan rasio Aktivitas pengelolaan keuangan daerah masih tergolong renda dari bagian rasio belanja modal karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% dengan rata-rata 14,98. Sedangkan untuk rasio belanja oprasional tergolong baik karena memiliki nilai rasio diatas 50% yaitu dengan rata-rata 66,48%.
6. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017–2021 Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selama lima tahun terakhir tidak terlalu baik. Hal ini dikarenakan rasio pertumbuhan yang berubah dari tahun ke tahun. Kemampuan pemerintah daerah untuk menekan pengeluaran belanja rutin dan lebih memanfaatkan uang yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan PAD merupakan bukti bahwa pertumbuhan bermanfaat bagi suatu daerah.

#### Rekomendasi

Pemerintahan kabupaten lamongan sebisa mungkin terus berupaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan lebih meningkatkan lagi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga PAD dapat dioptimalkan dan lebih meningkat lagi.

Disamping itu juga pemerintahan kabupaten lamongan juga harus melihat kinerja keuanagn daerah agar anggaran dan realisasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Bagi masyarakat juga harus ikutserta supaya dapat memeberikan yang terbaik untuk daerahnya dengan melakukan pembayaran pajak agar meningkatkan prekonomian daerah.



## **BAB VIII**

### **REFLEKSI DIRI**

Selama terlaksanakan kegiatan magang MBKM yang berlangsung selama 14 februari sampati dengan 13 juni 2022 yang berada di BPKAD Kabupaten Lamongan, kegiatan magang tersebut memberikan dampak bagi saya untuk menjadi mengerti pada dunia kerja. Hal tersebut memberikan bekal bagi saya untuk menjadikan yang lebih baik untuk menjalani dimasa yang akan datang.

Kegiatan magang yang memberikan banyak manfaat bagi saya dari segi softskill dimana selama kegiatan magang saya dapat meningkatkan kemampuan berfikir kedepan di dalam dunia kerja, adapun dari segi yang lain mampu mengembangkan kemampuan kongnitif saya antara lain yaitu meningkatkan pengetahuan standar oprasional kerja dalam perusahaan dan cara menerapkannya dengan baik. selain itu kegiatan magang saya juga dapat belajar berfikir secara luas dan juga belajar bagaimana untuk beradaptasi dengan orang baru atau lingkungan baru yang ada di dunia kerja, bagaimna cara berkomunikasi dengan baik di dunia kerja dan mendapatkan relasi banyak dari orang baru lain.

Kunci sukses bekerja berdasarkan pengalaman magang dalam perusahaan dari berbagai pengalaman yang saya dapat pada saat magang, hal yang dapat memebuat saya sukses yaitu fokus dalam apa yang di laksanakan pada saat itu, karena dengan fokus melangkah maka dapat ber pengaruh pada perjalanan untuk sukses, yang kedau yaitu kemauan untuk bertanya untuk mendptkan hal yang

baru yang belum pernah didapatkan dari segi apapun. Adapun selain itu terdapat berbagai aspek lainnya yang pertama yaitu attitude didalam dunia pekerjaan suatu hal yang harus dimiliki jika ingin menjadi sukses dalam segala hal, karena dengan attitude kita dapat memudahkan dalam mendapatkan relasi saat kerja. Yang kedua yaitu tanggung jawab, didalam melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab merupakan hal penting untuk menjadikan kepercayaan dalam pekerjaan dan ada beberapa hal yang dapat di dapatkan dengan bekerja secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu dengan disiplin dalam melaksanakan kerja karena dengan disiplin maka pekerjaan akan lebih ringan tanpa ada penundaan. Yang keempat motifasi kerja dalam kunci kesuksesan motifasi kerja sangat penting karena dengan adanya motifasi dapat meningkatkan keinginan suksesnya suatu tujuan.

Selama magang berlangsung membuat saya berencana untuk menyipakan bekal pengembangan diri dan karir dengan baik di masa yang akan datang, bekal dari pengembangan diri dan karir yang saya rencanakan terdiri dari beberapa aspek antara lain ilmu pengetahuan umum yang sangat penting bagi pengembangan diri dan karir karena pengetahuan umum bukan hanya untuk dunia kerja saja melainkan mencakup semua yang ada di kehidupan saya yang akan datang nanti. Karena dengan rencana maka nantinya akan terorganisir rapi apa yang kita impikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, B., Nugraha, S. J., & Puspita, V. A. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 534–551.
- Aringga., Topowijono., & A, Z. Z. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi pada PT. Pembangkit Jawa Bali - Surabaya 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 44(1), 83–88.
- Hanik, F. . dan, & Karyanti, T. . (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Perbankan Indonesia*, 22(2), 143–156.  
<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/jabpi/article/view/600>
- Lestari, P. I., & Shara, Y. (2021). Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 345–359.  
<http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8283>
- Novianti, I., Syamsidar, M., & Syawalina, C. F. (2018). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01), 115–130. <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1256>
- Rahmat, A. F., Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., & Mutiarin, D. (2020). Spending Review Berbasis Performance-Based Budgeting (Pbb) Terhadap Apbd Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018. *Reformasi*, 10(2), 186–208.  
<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1676>
- Ramadhan, F. N. (2017). *Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat*. 1392141013, 1–15.
- Riana, D., & Diyani, L. A. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Industri Farmasi (Studi Kasus pada BEI Tahun 2011–2014). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 16–42.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>

- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 6(September), 91–101. <https://www.neliti.com/publications/276917/analisis-rasio-untuk-pengukuran-kinerja-keuangan-dan-evaluasi-kinerja-keuangan-p>
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>

